



LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI KE PROVINSI JAWA TENGAH MASA RESES II TAHUN SIDANG 2023 – 2024 TANGGAL 6-10 DESEMBER 2023

KUNJUNGAN KERJA
KOMISI VIII DPR RI PADA RESES
MASA PERSIDANGAN II TAHUN
SIDANG 2023-2024

Semarang, Desember

BPKH
PROGRAM KEMASLAHATAN
BERBAGI BINGKISAN MAULID NABI 1445 H
BERSAMA BPKH

Penyaluran...
sejumlah 230.830 or...
Operasional Sekolah...
senilai Rp 27,4 M);
(MI, MTs, MA, TP...
bidang keagamaan...
Taklim, Vihara, Pur...

K... pada...
Keag...
M dan Bantuan...
182.361 siswa...
ndidikan agama...
Bantuan hibah...
LPTQ, Majelis...
Rp 30...)

- Kuota Haji Reguler 2023 sebanyak 30.377 dengan 28.494 Jamaah Haji 1.519 jamaah prioritas lansia
- Terdapat 880.522 daftar tunggu dengan masa tunggu 31 tahun. Fasilitasi jamaah haji di Asrama Haji Donohudan melalui mekanisme Pelayanan One Stop Servis di Asrama Haji agar jamaah dapat beristirahat dengan cukup

Sekretariat Komisi VIII DPR RI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

JADWAL DAN TIM KUNJUNGAN KERJA

BAB I PENDAHULUAN

BAB II SEKILAS MENGENAI PEMBANGUNAN
DI BIDANG AGAMA, SOSIAL,
PEMBERDAYAN PERAMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK, SERTA
PENANGGULANGAN BENCANA
DI JATENG

BAB III PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

BAB IV REKOMENDASI

BAB V PENUTUP



JADWAL ACARA

HARI/TGL	ACARA	KET
RABU 6 DESEMBER 2023		
Pkl. 06.00 WIB	Anggota Tim Kunker sudah berkumpul di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Terminal 3	<i>Check-in</i> 1 (satu) jam sebelum keberangkatan
Pkl. 07.10 WIB	<i>Take off</i> dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta	Pesawat QG-792
Pkl. 08.25 WIB	Tiba Di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang dan menuju ruang VIP	Penjemputan oleh Protokol
Pkl. 09.00 WIB	Perjalanan menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah	Patwal
Pkl. 09.15	Tiba di Kantor Gubernur Jawa Tengah	Protokol
Pkl. 09.30- 12.00 WIB	Pertemuan dengan Pj. Gubernur Jawa Tengah, Kakanwil Kemenag Prov. Jateng, Kadinsos Prov. Jateng, Kepala Dinas	Catatan: • Dihadiri oleh Pejabat dari Kemenag, Kemensos, KemenPPPA,

	<p>Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Prov. Jateng, Kepala BPBD Prov. Jateng, Ketua BAZNAS Prov Jateng, Ketua BWI Prov. Jateng, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.</p> <p>Tema: Pembangunan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Jateng</p>	<p>BNPB, BPKH, Baznas dan BWI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acara diakhiri dengan penyerahan bantuan sosial secara simbolis
Pkl. 12.00 WIB	ISHOMA	Protokol
KAMIS 7 DESEMBER 2023		
Pkl 09.30 WIB	Pertemuan dengan Ketua Baznas Prov Jateng	Dihadiri pejabat Baznas Prov Jateng
Pkl 12.00 WIB	ISHOMA	Protokol

JUMAT 8 DESEMBER 2023		
Pkl 09.30 WIB	Pertemuan di Kantor Kanwil Kemenag Provinsi Jateng membahas persiapan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M di Provinsi Jateng	Dihadiri pejabat Ditjen PHU Kemenag
Pkl 11.30 WIB	ISHOMA	Protokol
SABTU 9 DESEMBER 2023		
Pkl. 09.30 WIB	Peninjauan ke kantor Dinas Sosial Provinsi Jateng diakhiri dengan penyerahan bantuan sosial	Dihadiri pejabat Kemensos
Pkl. 13.00 WIB	ISHOMA	Protokol
Pkl 15.00 WIB	Tim Sekretariat mengumpulkan data dan bahan terkait pelaksanaan kunjungan kerja	Sekretariat
MINGGU 10 DESEMBER 2023		
Pkl. 09.30 WIB	Tim Sekretariat menyusun laporan dan rekomendasi kunjungan kerja	Sekretariat
Pkl. 17.10 WIB	<i>Take off</i> dari Bandara Semarang	Protokol
Pkl. 18.10 WIB	Tiba di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta	

DAFTAR NAMA

NOMOR		N A M A	JABAT AN	FRAK SI	DAPIL
UR UT	AN GG				
1	A-098	H. ABDUL WACHID	Ketua Tim/ Wkl. Ketua	GRD	JATENG II
2	A-154	I KOMANG KOHERI, S.E.	Anggota	PDIP	LAMPUNG II
3	A-211	UMAR BASHOR, S.E.	Anggota	PDIP	JATIM IV
4	A-220	Ir. MINDO SIANIPAR	Anggota	PDIP	JATIM VIII
5	A-298	Hj. ITJE SITI DEWI KURAESIN, S.Sos., M.M.	Anggota	PG	JABAR IX
6	A-323	MUHAMMAD ALI RIDHA	Anggota	PG	JATIM XI
7	A-346	Dra. Hj. IDAH SYAHIDAH RUSLI HABIBIE, M.H	Anggota	PG	GORONTALO
8	A-107	LAKSDYA. TNI (PURN) MOEKHLAS SIDIK, MPA.	Anggota	GRD	JATIM II
9	A-125	Drs. H. SAIFUL RASYID, M.M.	Anggota	GRD	KALSEL I
10	A-3	Drs. H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH,	Anggota	NAS DEM	JABAR

11	A-022	H. LUQMAN HAKIM, S.Ag.	Anggota	PKB	JATENG VI
12	A-028	MF. NURHUDA Y	Anggota	PKB	JATENG X
13	A-440	WISNU WIJAYA ADI PUTRA, S.E.	Anggota	PKS	JATENG I
14	A-483	H. MHD ASLI CHAIDIR, S.H.	Anggota	PAN	SUMBAR I
15	A-468	K.H. MUSLICH ZAINAL ABIDIN	Anggota	PPP	JATENG VI
16	A-475	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.	Anggota	PPP	KAL SEL I
17	-	YUSUP KAMALUDIN	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
18	-	MOHAMMAD HASYIM, S.S., M.Si.	TENAGA AHLI KOMISI VIII		
19	-	Dr. AGUS SUSANTO, M.A	TENAGA AHLI KOMISI VIII		
20	-	KUNTO CATUR PANGESTU, S.H., M.H.	TENAGA AHLI KOMISI VIII		
21	-	INAH ROFIKOH	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
22	-	VERRA SULISTIOWATI	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
23	-	SURAHMAT EKO BUDISETIANTO	MEDIA DPR RI		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR-RI dalam kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 telah membentuk Tim Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

B. Dasar Kunjungan Kerja

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, 21 dan 23 tentang tugas DPR-RI di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah dalam Undang undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 98 Ayat (4) huruf f. tentang Tugas Komisi di Bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
3. Keputusan DPR RI Nomor 02 tahun 2018 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;

- b. Pasal 58 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan; dan
 - c. Pasal 59 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi DPR RI pada Masa Reses.
4. Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII DPR RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah maupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta penanggulangan bencana.
- b. Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- c. Menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

2. Tujuan

- a. Secara umum untuk mendapatkan masukan berupa data faktual tentang pelaksanaan program pembangunan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah.

b. Secara khusus untuk memperoleh informasi dan data akurat mengenai kinerja Kanwil Kemenag Jawa Tengah, Dinas Sosial Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Bencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah.

D. Objek Kunjungan

1. Melakukan pertemuan di Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk membahas mengenai pembangunan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta penanggulangan bencana di wilayah Jawa Tengah.
2. Peninjauan ke Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sekaligus melakukan penyaluran bantuan sosial.
3. Mengunjungi Kantor Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M di wilayah Provinsi Jateng.

BAB II

SEKILAS MENGENAI PEMBANGUNAN DI BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAN PERAMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PENANGGULANGAN BENCANA DI JATENG

Provinsi Jawa Tengah (Jateng), dengan Ibukota Semarang, memiliki luas wilayah 32.800,69km² dengan jumlah penduduk menurut BPS Tahun 2021 sebanyak 36.516.035 jiwa.¹

Pj. Gubernur Jateng **Komjen (Pol) Drs. Nana Sudjana AS, MM.** mengatakan bahwa dalam rangka mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jateng telah dialokasikan anggaran lebih Rp 111 Triliun yang bersumber dari APBN 2024. Kemudian alokasi anggaran dari APBD Jateng tahun 2024 juga meningkat Rp 7 Triliun dibanding tahun 2023.

"Penganggaran ini dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kita juga terus melaksanakan dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah," ucap Nana dalam keterangan tertulis, Senin (4/12/2023).²

Fokus dari pengelolaan anggaran tahun 2024 ini digunakan untuk perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), percepatan transformasi ekonomi hijau melalui hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), pemberian subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran, penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara.

"Kita tetap prioritaskan program nasional juga termasuk program daerah seperti masalah penanganan

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah

² <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7071694/serahkan-dipa-tkd-2024-pj-gubernur-jateng-kita-upayakan-kesejahteraan>

stunting, penanganan masalah kemiskinan, dan juga masalah kestabilan inflasi," lanjut Nana.

Kemudian dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, peningkatan profesionalitas SDM di Jawa Tengah.

A. Profil Kanwil Kemenag Jateng

Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Tengah dikepalai oleh **H. Musta'in Ahmad, SH., MH.** yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Menteri Agama RI pada 7 Juli 2020.

Jumlah pemeluk agama di Jawa Tengah, berdasarkan website *jateng.kemenag.go.id*, meliputi 35.650.773 beragama Islam, 581.093 Kristen, 431.208 Katolik, 75.695 Hindu, 65.278 Budha dan 3.960 Konghucu.

Untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M, jumlah calon jamaah haji lansia dari Provinsi Jateng menduduki peringkat kedua setelah calon jamaah haji asal Provinsi Jabar.³

Rinciannya calon jamaah haji lansia asal Jateng sebanyak 8.108 orang atau peringkat kedua setelah Jabar sebanyak 8.289 orang, ranking ketiga Jawa Timur 7.485 orang, ranking keempat Lampung 1.770 orang, dan ranking kelima DKI Jakarta 1.722 orang.

Apabila dilihat dari usianya, jamaah haji paling tua asal Jateng satu orang yakni berusia 109 tahun,

³ <https://jatengdaily.com/2023/calon-haji-2024-dari-jateng-didominasi-ibu-rumah-tangga-capai-54-848-orang/>

kemudian usia 106 tahun dan 104 tahun masing-masing satu orang, 103 tahun 10 orang, 102 tahun 13 orang, 101 tahun 12 orang dan 100 tahun sebanyak 21 orang.

Para calon jamaah haji asal Jateng didominasi oleh para ibu rumah tangga sebanyak 54.848 orang, disusul pensiunan 8.854 orang, pelajar/mahasiswa 5.920 orang, BUMN/BUMD 3.283 orang dan lain-lain 918 orang.

Dilihat dari jenis kelamin, jumlah calon jamaah haji perempuan juga mendominasi sebanyak 109.568 orang dibanding calon jamaah haji laki-laki sebanyak 91.495 orang.

B. Profil Dinas Sosial Jateng

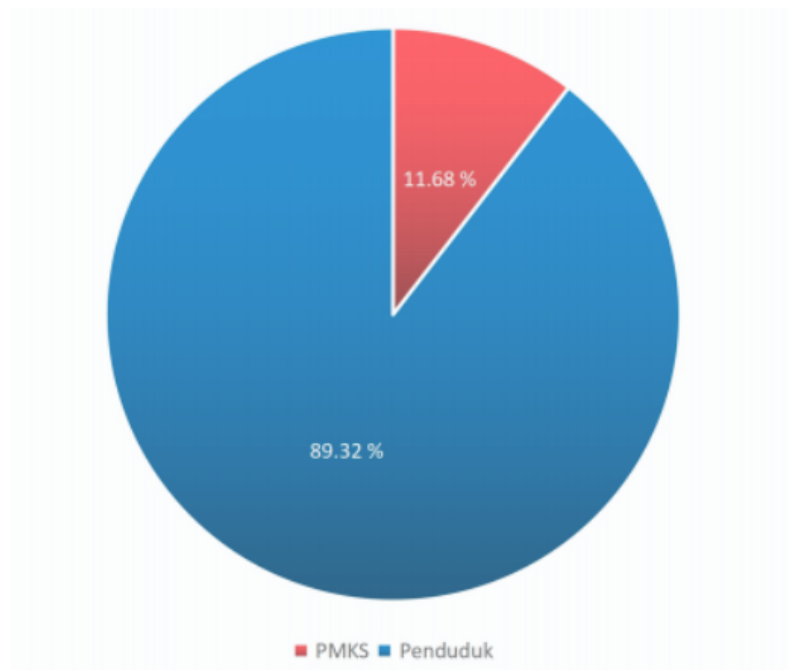
Dinas Sosial Jawa Tengah dikepalai oleh **Drs. Imam Maskur, M.Si.** Fokus pembangunan kesejahteraan sosial di Jateng diarahkan pada 7 permasalahan, yakni penanganan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, keterpencilan, korban bencana dan tidak kekerasan serta pekerja migran.

Menurut website *dinsos.jatengprov.go.id*, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jateng cukup tinggi, yakni sekitar 11,68 persen atau setara dengan 4,2juta jiwa dari total penduduk Jateng sebanyak 36,5 juta jiwa.⁴

⁴ https://dinsos.jatengprov.go.id/detail_informasi/informasi-berkala/Sebaran_Data_PMKS-PPKS/90

PMKS atau biasa disebut juga sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial meliputi anak terlantar, anak jalanan, tuna wisma, tuna susila, pengemis, gelandangan, korban penyalahgunaan napza, penyandang HIV, fakir miskin, dan penyandang masalah sosial lainnya.

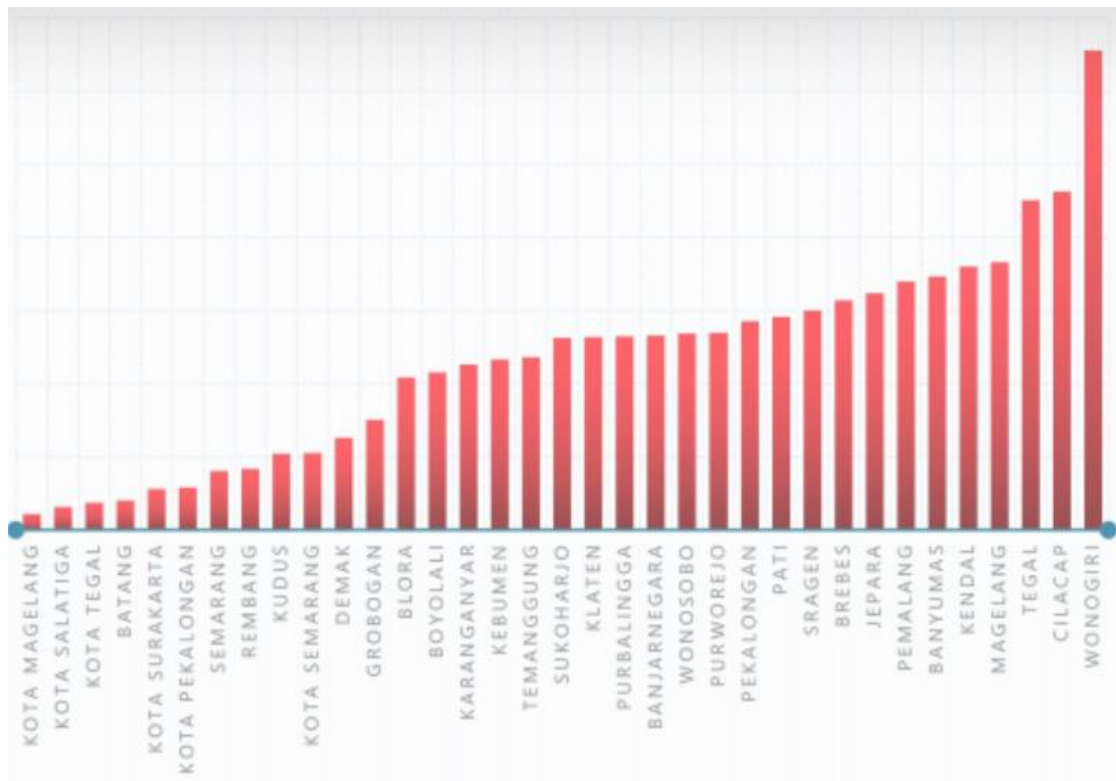
Gambar 1.



Jumlah PMKS di Jateng 11,68 persen

Dari 4,2 juta jiwa PMKS, jumlah PMKS terbanyak tercatat berada di Kabupaten Wonogiri sebanyak 327ribu orang sedangkan PMKS yang paling sedikit berada di Kota Magelang (Gambar 2):

Gambar 2.



C. Profil Dinas P3AP2KB Jateng

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah dikepalai oleh **Dra. Retno Sudewi, APT., M.Si., MM.**

Menurut website dp3akb.jatengprov.go.id, Dinas P3AP2KB Jateng memberikan layanan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak dengan membentuk jaringan dari berbagai institusi pemerintah, penegak hukum, dan lembaga serta organisasi yang memiliki kepedulian terhadap persoalan perempuan dan anak.

Layanan terpadu yang diberikan adalah: layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, serta layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Kerjasama yang dilakukan antara lain dengan membentuk Pos Pelayanan Perlindungan Anak (Pos PPA) yang akan bekerjasama dengan PPT/P2TP2A untuk memberi akses perlindungan bagi anak korban kekerasan.

D. Profil BPBD Jateng

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah dipimpin oleh Kalakhar **Bergas C. Penanggungan, S.Sos., M.Si.**

Tujuan pembangunan masyarakat Jawa Tengah yang tangguh dalam menghadapi bencana, seperti dikutip dari *bpbd.jatengprov.go.id*, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana.
2. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana.
3. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca-bencana.
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana.
5. Meningkatnya kapasitas pelayanan, kinerja dan kerjasama penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB III

PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah

Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang diketuai oleh Abdul Wachid Fraksi Gerindra yang merupakan daerah pilihannya yaitu Jawa Tengah II diterima langsung oleh Penjabat Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs Nana Sudjana A.S., M.M yang sebelumnya Pj Gubernur tersebut menjabat sebagai Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI selama 6 (enam) bulan dan 3 (tiga) bulan sudah menjabat sebagai Pj Gubernur Jawa Tengah.

Pada sambutan Pj Gubernur Jawa Tengah dengan hangat menerima kunjungan kerja komisi VIII DPR RI dan bangganya mengakui bagian keluarga dari DPR RI selama 6 bulan serta mendapat kepercayaan sebagai tim pengawas penyelenggaraan ibadah Haji dan dapat melaksanakan ibadah Haji pada tahun 2023.

Selanjutnya Pj Gubernur memberikan paparan mengenai Pembangunan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah pada bidang keagamaan melalui penyaluran dana hibah kepada instansi vertical bantuan insentif pengajar keagamaan sebanyak 230.830 orang senilai Rp 277 M dan bantuan operasional sekolah daerah MA untuk 182.361 siswa senilai Rp 27.4 M bantuan hibah

bidang pendidikan agama MI, MTS, MA, TPQ, Madin, Ponpes serta bantua hibah bidang keagamaan masjid, musholla, geraja, LPTQ, Majelis Taklim, Vihara, Pura kepada 790 lembaga senilai Rp 30.48 M.

Mengenai penyelenggaraan Haji 2023 di informasikan petugas Haji daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 ada 15 orang dan petugas Haji daerah kab/kota ada 238 orang, kuota Haji regular 2023 sebanyak 30.377 dengan 28.494 Jemaah Haji 1.519 Jemaah prioritas lansia terdapat 880.522 daftar tunggu dengan masa tunggu 31 tahun, fasilitas Jemaah Haji di Asrama Haji Donohudan melalui mekanisme Pelayanan One Stop Service di Asrama Haji agar Jemaah dapat beristirahat dengan cukup.

Kegiatan di bidang agama yang telah dilakukan pada umumnya perayaan hari besar keagamaan, didukung dengan Jawa Tengah Bersholawat serta sarasehan pencegahan stunting di kalangan santri dan siswa di kalangan santri dan siswa dengan tema “Jo Kawin Bocah”.

Pembangunan bidang Sosial, Jawa Tengah dilatarbelakangi oleh tuntutan masyarakat pada pelayanan kesejahteraan sosial, permasalahan kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani secara hit and run tetapi memerlukan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan serta perlunya keterpaduan dan sinkronisasi program kegiatan pembangunan kesejahteraan Sosial antar Provinsi dan Kab/kota.

2 indikator kinerja utama pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah target penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebesar 2,37% pada tahun 2023 dan target presentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang mendapatkan penguatan dan pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial (UKS) sebesar 34.38%.

Dalam pelaksanaan pembangunan bidang sosial diperlukan isu strategis yaitu pemenuhan basic life access dan penguatan sustainable livelihood bagi PPKS dalam pemenuhan perlindungan sosial adaptif, pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial (rehabsos dan penanganan intervensi penanggualang kemiskinan, pendampingan sosial bagi PPKS dengan meningkatkan peran masyarakat melalui potensi sumber kesejahteraan sosial.

Kegiatan strategisnya yaitu Bansos Kartu Jateng Sejahtera, Pengelolaan data kemiskinan, Bansos kelompok usaha bersama (KUBE) dan usaha ekonomi produktif fakir miskin (UEP FM) penanganan korban bencana, penanganan PPKS dalam panti, peningkatan kapasitas PSKS, rehab sarpras panti, subsidi satu orang satu hari (SOSH) panti swasta.

Anggaran per program KUA PPAS tahu 2024 digunakan untuk pemberdayaan sosial, penanganan bencana, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, program pengelolaan TMP, dan perlindungan migran korban tindak kekerasan.

Pembangunan bidang kebencanaan di provinsi Jawa Tengah, saat ini wilayah Jawa Tengah memiliki beberapa ancaman bencana seperti Banjir, Longsor, Kekeringan, Tsunami, Gempa Bumi, Angin Puting Beliung, Gunung Berapi, serta kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan bencana meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistic dan peralatan, droping air bersih didukung oleh dana CSR perusahaan diwilayah Jawa Tengah, penanganan kebakaran TPA Jatibarang, Musim penghujan tahun 2023/2024 telah dilaksanakan rapat kordinasi dan apel kesiapsiagaan.

Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak wilayah provinsi Jawa Tengah, isu strategis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana meliputi pemberdayaan perempuan dan pengarusamaan gender (PUG) melakukan pendampingan kelompok pasca pelatihan ekonomi masih belum optimal dilakukan, Pengarusamaan gender belum menjadi isu penting dalam perencanaan setiap OPD.

Perlindungan Perempuan dan Anak masih tingginya kekerasn perempuan dan anak, kekerasan berbasis gender online semakin meningkat, belum semua kab/kota memiliki UPTD PPA, masih tinggi angka perkawinan usia anak dan anak tidak sekolah, masih

rendahnya pemahaman masyarakat terkait hak perempuan dan anak.

Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana masih rendahnya kesertaan keluarga berencana karena dokumen GDPK belum menjadi acuan pembangunan kependudukan didaerah, masih minimnya informasi manfaat keluarga berencana terutama di desa, masih rendahnya rasio PLKB terhadap jumlah desa binaan, jumlah saat ini 1:6 angka idealnya 1:2.

Pemenuhan Anak implemntasi KLA di Kab/Kota belum optimal (jawa tengah sudah menjadi provinsi layak anak/ provila), forum anak belum menjadi bagian dari system perencanaan yang terintegrasi dan berjenjang.

Saat ini 5 araha kebijakan nasional dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, pencegahan perkawinan anak.

Program strategis yang dilakukan pemerintahan provinsi Jawa Tengah yaitu peningkatan produktifitas ekonomi perempuan, implementasi desa ramah perempuan dan peduli anak, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pembentukan rumah perlindungan pekerja perempuan di kawasan industri,

kanal aduan kekerasan perempuan dan anak melalui pengaduan langsung mil uptd ppa, pengaduan online, layanan sapa 129.

Inovasi yang diberikan dari pemerintahan provinsi Jawa Tengah yaitu JO KAWIN BOCAH, SERAT KARTINI, DIYANTI, APEM KETAN, JOGO KONCO, CARE CENTER, NGOPI PENAK, DAN CETING KETAN.

Adapun beberapa prestasi pemerintahan provinsi Jawa Tengah ketegori tingkat nasional yaitu, sekolah siaga kependudukan paripurna dari bkkbn pusat, nominasi pemerintahan daerah provinsi dalam komitmen terhadap perlindungan anak melalui system informasi monitoring dan evaluasi pelaporan oleh komisi perlindungan anak Indonesia, provinsi layan anak dari kementerian PPPA RI 3 kali berturut – turut, DAFA Award untuk forum anak jateng dari kementerian PPPA RI, Gubernur Jawa Tengah mendapatkan kehormatan SATYA LENCANA WIRA KARYA atas prestasinya dalam program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana di Jawa Tengah, Pusat Pembelajaran Keluarga Jawa Tengah meraih penghargaan tematik pemenuhan hak anak sebagai PUSPAGA terstandart utama dari Kementerian PPPA.

Pertemuan di pemerintahan provinsi Jawa Tengah di akhiri dengan penyerahan bantuan dari BPKH dan KEMENSOS RI.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah

Pertemuan kedua tim kunjungan kerja komisi VIII DPR RI dilanjutkan pada kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah, rombongan tim diterima oleh Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan jajarannya Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si sebagai Ketua, Drs. KH. Ahmad Hadlor Ihsan sebagai Wakil Ketua I, Drs. H. M. Zain Yusuf, MM sebagai Wakil Ketua II, Dr. H. Rozihan, SH., M.Ag sebagai Wakil Ketua III, H. Sholahuddin Aly, S.H sebagai Wakil Ketua IV, dan Drs. H. Ahyani, M.SI sebagai Sekretaris.

Pertemuan dibuka oleh Ketua Baznas dilanjutkan oleh Ketua Tim kunjungan kerja komisi VIII DPR RI serta memperkenalkan anggota tim yang hadir dalam pertemuan di BAZNAS.

Ketua BAZNAS melakukan paparan kinerja BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dengan poin sebagai berikut penghimpunan BAZNAS dari tahun 2014 sebesar Rp 110 jt dan pada tahun 2015 sebesar 1.9 Milyar lalu pada tahun 2022 sebesar Rp 86 M dan pada tahun 2023 sebesar 83 M.

Penggunaan konsumtif pertama di Pendidikan meliputi sarana bangunan sekolah dasar, pondok pesantren dan tpq, juga beasiswa melalui 15 perguruan tinggi, lalu unruk kesehatan bantuan kaki palsu, kursi roda dan alat bantu dengar, lalu untuk tempat ibadah masjid sebanyak 796 unit dan mushola sebanyak 633 unit, lalu untuk bisyaroh guru madin, penyuluh agama,

guru tpq, imam 147 orang, dan pejuang 49 orang, lalu untuk bencana semeru Jawa Timur, 19 titik Jawa Tengah, 4 kali pelatihan BTB, Palu Sulawesi Tengah, Lombok NTT.

Untuk Lingkungan rumah tidak layak huni sebanyak 2.179 unit dan Jambanisasi sebanyak 918 unit, lalu untuk covid 19, modal usaha, kurban produktif, serta penanggulangan kemiskinan ekstrim.

Pertemuan diakhiri dengan makan siang sop kambing dan sop buntut menu yang dijadikan makanan kaleng sebagai tester makanan yang akan dibagikan kepada kaum fakir miskin.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah

Menghadiri kantor wilayah kementerian Agama Jawa Tengah tim kunjung kerja reses komisi VIII DPR RI seketika meninjau langsung gedung atau fasilitas yang baru terbangun apakah sudah sesuai standar pelaksanaan dengan baik atau tidak hanya saja fasilitas belum selesai di lengkapi seperti kamar tidur dan fasilitas pendukung lainnya pada ruang penginapan tersebut.

Pertemuan dengan pejabat kantor wilayah kementerian Agama Jawa Tengah diterima oleh Plh. Kakanwil Jawa Tengah yaitu DR. H. Wahid Arbani, M.S.I beserta jajarannya dan segera melakukan paparan

persiapan penyelenggaraan Haji tahun 1445 / 2024 M sebagai berikut.

Kuota Haji Awal Reguler Jawa Tengah tahun 2024 sebanyak 30.377 dan tambahan kuota sebesar 3.039 jemaah diantaranya Jemaah Haji Prioritas Lansia sebanyak 1.519 jemaah, daftar tunggu atau waiting list sebanyak 880.522 dengan masa tunggu selama 31 tahun.

Persiapan yang dilakukan yaitu rekrutmen petugas PPIH kloter dan PPIH Arab Saudi rencana akan dilakukan tanggal 21 Desember 2023 tk Kab Kota dan tanggal 28 Desember 2023 tingkat Kanwil, verifikasi Jemaah yang berhak melunasi untuk di Kab Kota dan dilaporkan kembali ke Dirjen PHU untuk publis Jemaah berhak lunas dan sampai saat ini data yang masuk sudah 100% terverifikasi, selanjutnya pembuatan paspor Jemaah Haji di Kab Kota se Jawa Tengah yang saat ini masih berlangsung dan paspor yang sudah jadi sebanyak 12.376 paspor, rapat sosialisasi dengan Kasi PHU Kab Kota se Jawa Tengah terkait dengan perekaman Saudi Visa Bio.

Penguatan pelayanan Jemaah haji dilakukan dengan uji coba pelayanan one stop servis di asrama haji akan di maksimalkan agar Jemaah dapat beristirahat dengan cukup, kepulangan Jemaah dari kota semarang langsung di asrama haji manyaran untuk memaksimalkan fungsi asrama haji manyaran, tahun 2024 rencana kepulangan Jemaah dari kota semarang

dan kab Kendal langsung ke asrama haji manyaran untuk memaksimalkan fungsi asrama haji manyaran, tahun 2024 rencana kepulangan Jemaah dari kota semarang dan kab Kendal langsung ke asrama haji manyaran untuk memaksimalkan fungsi asrama haji manyaran.

Pertemuan dengan jajaran kantor wilayah kementerian agama provinsi Jawa Tengah di akhiri dengan Tanya jawab antar anggota tim kunjungan kerja reses komisi VIII DPR RI dengan Plh Kepala Kantor beserta jajarannya.

Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah diterima langsung oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Drs Imam Maskur, M.Si beserta jajarannya.

Ketua tim kunjungan kerja reses Komisil VIII DPR RI Abdul Wachid memperkenalkan seluruh anggota tim kunjungan kerja yang hadir dari berbagai daerah pilihan.

Telah hadir ditempat juga para penerima manfaat bantuan dan para pendamping dari program ATENSI, PKH, KUBE, PENA, Program Sembako, Santunan Ahli Waris Korban Bencana Sosial, Bantuan Kearifan Lokal, Bantuan Sosial, Bantuan Kearifan Lokal, Bantuan Permakanan Lanjut Usia dan Bantuan Permakanan Disabilitas.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mengucapkan selamat datang dan melaporkan tugas pelaksanaan Dinas Sosial kepada Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memiliki 27 Unit Pelaksana Teknis (UPT)/ Panti Pelayanan Sosial dengan total jumlah panti dan rumah pelayanan sebanyak 56 Panti dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani dalam panti sebanyak 4.602 orang.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah Dinas Sosial berkolaborasi dengan banyak pihak, karena Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tidak mungkin ditangani sendiri oleh pemerintah.

Peran strategis DPR RI sebagai political representation dapat mendorong akselerasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial serta dapat mendukung anggota pada urusan Sosial yang menjadi urusan wajib sama wajibnya dengan urusan pendidikan yang sudah mendapat alokasi mandatory spending 20% hal ini penting mengingat urusan wajib berupa rehabilitasi sosial dalam panti yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi banyak mengalami kendala seperti keterbatasan SDM dan Sarana dan prasana ucap Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah.

Kegiatan kunjungan kerja reses komisi VIII DPR RI di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah diakhiri

dengan rangkaian pemberian bantuan dari Mitra Kerja Komisi VIII DPR RI Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan nilai total bantuan sebesar RP 5.895.3328.596.348 yang diberikan melalui program Atensi melalui Sentra Kartini sebesar Rp 112.025.000, Yapi sebesar Rp 913.400.000, Program Keluarga Harapan sebesar Rp 4.648.250.325.725, Program Sembako Rp 1.244.810.600.000, Program Pena Rp 84.789.623, Santunan Ahli Waris Korban Bencana Sosial Rp 30.000.000,- Bantuan Kearifan Lokal Rp 50.000.000,- Bantuan Permakanan Lanjut Usia sebesar Rp 540.704.000, Bantuan Permakanan Disabilitas sebesar Rp 536.752.000.

BAB IV

REKOMENDASI

Bahwa pada kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut;

1. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Sosial RI untuk membantu menurunkan jumlah kasus stunting di wilayah Provinsi Jawa Tengah serta berkolaborasi penuh dengan Dinas Sosial Jawa Tengah;
2. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama untuk menjamin pelayanan penyelenggaraan

- ibadah Haji 1445 H 2024 SM berjalan dengan baik nyaman aman bagi Jemaah;
3. Komisi VIII DPR RI meminta BAZNAS untuk meningkatkan penerimaan zakat dan penyalurannya agar bermanfaat secara maksimal bagi umat;
 4. Komisi VIII DPR RI mendukung kegiatan beragama Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
 5. Komisi VIII DPR RI meminta BNPB memberikan program dan anggaran yang digunakan untuk meningkatkan early warning system kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah;
 6. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menambah alokasi anggaran sosialisasi terhadap peristiwa dan menurunkan peningkatan anak kawin dibawah umur;

BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses ini dibuat untuk menjadi bahan rapat kerja serta evaluasi Mitra Komisi VIII DPR RI.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

H. ABDUL WACHID